

**PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR MELALUI
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM
MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENTS GOAL'S**

Khaidir Fadil¹, Amran¹, Noor Isna Alfaien²

¹PGMI Universitas Ibn Khaldun Bogor

²PAI Universitas Ibn Khaldun Bogor

khaidir.fadil@uika-bogor.ac.id, amran@uika-bogor.ac.id, n.alfaien@uika-bogor.ac.id,

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan analisis isi. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, dan sumber bacaan lainnya, baik cetak maupun online. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan membaca dan mencatat bahan penelitian, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara menyajikan data dan membahasnya secara kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia, serta faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dasar di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan dasar yang berkualitas untuk mewujudkan program SDG, diperlukan upaya dan kerjasama yang signifikan antara pemerintah dan swasta, serta lembaga pendidikan itu sendiri, seperti optimalisasi pelaksanaan kurikulum belajar mandiri di sekolah dasar, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru, menjamin pemerataan mutu, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersekolah di lembaga pendidikan yang berimbang di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka Belajar ; Pembangunan Berkelanjutan ; Pendidikan Dasar.

Abstrak

The goal of this study is to discover how efforts are made to improve the quality of basic education in order to achieve sustainable development goals. This study's research method is library research with content analysis. This study uses various data sources in the form of scientific journals, books, and other reading sources, both print and online. The data collection technique in this study was to read and record research materials, then the next step was to analyze the data by presenting the data and discussing it qualitatively. This research reveals what efforts can be made to improve the quality of basic education in Indonesia, as well as what factors cause the low quality of basic education in Indonesia. To achieve the goal of quality basic education to realize the SDG program, there is a need for significant efforts and collaboration between the government and the private sector, as well as the educational institutions themselves, such as optimizing the implementation of the independent learning curriculum in elementary schools, increasing the professionalism and

welfare of teachers, ensuring quality equity, and providing students with the opportunity to attend school in educational institutions that are balanced throughout Indonesia.

Kata kunci: *Basic Education ; Sustainable Development Goal's ; Free Learning Curriculum.*

PENGANTAR

Pendidikan suatu hal yang disepakati menjadi hal yang pokok dalam suatu bangsa manapun. Kualitas pendidikan dalam suatu bangsa menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa tersebut. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa atau negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikan di bangsa dan negara tersebut. Buruknya kualitas pendidikan yang ada akan membuat bangsa atau negara tersebut mengalami ketertinggalan. (Nur & Kurniawati, 2022a)

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Potensi diri merupakan aspek utama yang perlu menjadi perhatian seseorang sebelum ia melihat pada dunia kerja yang akan dimasukinya. Betapapun tingginya pendidikan formal pendidikan seseorang, kalau ia tidak terampil melakukan apa yang sudah diketahuinya, maka keberhasilan akan menjauh dari dirinya (Humaira:2020)

Pendidikan masa kini adalah pendidikan yang mengadopsi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Tujuan kurikulum ini adalah perbaikan sumber daya manusia dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, pendidikan yang menerima kurikulum ini mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peran setiap jenjang sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program-program ini. (Vhalery et al., 2022)

Kemendikbud Ristek telah mengeluarkan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi (PT). Kebijakan ini membolehkan mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus maksimal 2 (dua) semester. Konsep *link and match* antara kurikulum pendidikan tinggi dengan dunia kerja diusung sebagai salah satu pemikiran utama dari kurikulum MBKM. Kurikulum universitas dan program studi difokuskan pada kebutuhan dunia usaha dan industri. Faktor industri dalam kebijakan MBKM ditonjolkan dan diperkuat dengan memberikan hak kepada mahasiswa

untuk mengikuti program dan melakukan transfer kredit (Kodrat, 2021). Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Oleh karena itu, Kemendikbud Ristek telah menentukan 8 (delapan) indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi sebagai acuan arah pengembangan kurikulum MBKM (Kemendikbud, 2021) meliputi 1) lulusan mendapat pekerjaan yang layak, 2) mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, 3) dosen berkegiatan di luar kampus, 4) praktisi mengajar di dalam kampus, 5) hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, 6) program studi bekerja sama dengan mitra dunia, 7) kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan 8) program studi berstandar internasional. Demi tercapainya kedelapan IKU melalui implementasi MBKM, perguruan tinggi harus memiliki keberanian mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel. (Suastika et al., 2022)

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Seperti yang tertuang pada buku pedoman MBKM, melalui delapan Bentuk Kegiatan Belajar (BKP) mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, mendapatkan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Selain itu juga dapat mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. (Rusli Baharuddin, 2021)

Dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan harapan mampu mengembangkan keterampilan *soft skill* maupun *hard skill* yang siap menghadapi tantangan zaman (Puspitasari & Nugroho, 2020.) Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Implementasi MBKM memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk beradaptasi dengan budaya belajar yang berbeda di institusi Pendidikan lain (Andari et al., 2022.) Hal ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan *softskills* mahasiswa baik secara

kognitif maupun empiris; memunculkan sikap kompetitif-kolaboratif yang berlandaskan nalar ilmiah sehingga menghasilkan sikap adaptif baru terhadap profesi dan lapangan kerja baru. (Chrisyarani et al., 2022)

Sampai saat ini, pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis besar karena perkembangan dan kebutuhan akan pendidikan tidak dapat terpenuhi oleh sumber sumber yang tersedia, turbulensi keadaan sosial-politik dan krisis kepemimpinan. Menurut Fajri, masalah yang di hadapi pendidikan itu terbagi menjadi 2 yakni masalah mikro dan masalah makro. Masalah mikro merupakan masalah yang ditimbulkan dalam komponen dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah makro, merupakan masalah yang ditimbulkan dari dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas mencakup seluruh kehidupan manusia, seperti tidak meratanya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah. Begitupun dengan Indonesia, pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapi dengan berbagai permasalahan. Permasalahan itu menjadi penyebab utama dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia (Nur & Kurniawati, 2022b)

Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (*Programme for International Student Assesment*) pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangatlah memprihatinkan. Tentu sangat disayangkan, dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak, seharusnya pendidikan bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia namun nyatanya tidak seperti itu.(Nur & Kurniawati, 2022b)

Dengan kondisi kualitas pendidikan Indonesia yang terbilang sangat kurang dibandingkan negara-negara lain di dunia, banyak yang menjadi faktor penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut Kurniawan, faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu sistem pendidikan juga bisa dikarenakan oleh peserta didiknya, peran seorang guru, kondisi ekonomi, sarana dan prasarana, lingkungan, serta masih banyak faktor yang lainnya.(Yonisa et al., 2016)

Menurut (Musrifah, 2018) pendidikan nasional mengalami permasalahan diantaranya pertama, kekeliruan filosofis yang mengartikan mutu dengan indeks prestasi, kedua, lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik islam, ketiga, manajemen pendidikan islam bersifatsentralistik, strukturalistik, birokratik, keempat, sistem pembelajaran bersifat paternalistic, harismatik, mileteristik, dan monolog. (Adelia & Mitra, 2021)

Pengentasan permasalahan pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif. Dalam hal ini, Banghart dan Trull merekomendasikan beberapa hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan, di antaranya: (1) mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait dengan sistem pendidikan; (2) mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan dalam kaitannya dengan masalah-masalah khusus pendidikan; (3) mencermati masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian, penelitian, dan pengembangan; (4) mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada; serta (5) melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya(Saihu, 2019)

Saat ini, Indonesia sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan kurikulum merdeka belajar. Penerapan kurikulum merdeka belajar ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia dalam meningkatkann kualitas pendidikannya dan meningkatkan daya saing agar setara dengan negara-negara lain. Hal ini sejalan pula dengan wacana pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam bidang pendidikan yang dicanangkan oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia melalui program *suistanable develovments goal's* (SDG'S) SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak memasuki tahun 2000 telah mencanangkan program MDGs untuk kurun waktu 2000 hingga 2015. Sejak 2016 hingga tahun 2030, PBB kembali mencanangkan program SDGs. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia bersama 192 negara lainnya turut serta mengadopsi SDGs sebagai program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 telah turut serta berkomitmen untuk menyukseskan SDGs.

Indonesia telah turut serta bersama negara lainnya untuk menyukseskan MDGs. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 70% program dan tujuan MDGs telah terlaksana dan dicapai oleh Indonesia . Hal ini tentu menggembarakan dan akan mempengaruhi pandangan internasional terhadap kepemimpinan nasional. Sebagai program lanjutan dari MDGs, SDGs memiliki goals atau tujuan yang lebih variatif dan indikator keberhasilan yang lebih kompleks. Jika MDGs hanya mencantumkan 8 goals, maka SDGs memiliki 17 tujuan atau goals yang harus dicapai. Diantaranya adalah bidang pendidikan

Pemerintah berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas diseluruh wilayah Indonesia sehingga mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul. Skema Zonasi sekolah yang tengah dicanangkan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah suatu upaya positif untuk mengurangi disparitas dan label sekolah favorit dengan sekolah non favorit sehingga ke depan seluruh sekolah berhak memiliki kualitas yang sama baiknya dan seluruh siswa dapat bersekolah pada lokasi terdekat dari tempat tinggal dengan kualitas yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Kesempatan belajar sepanjang hayat adalah implementasi dari Undang-undang yang mewajibkan wajib belajar Sembilan tahun. Negara menjamin seluruh warga negara untuk dapat mengakses pendidikan berkualitas dengan dukungan penuh negara sehingga keluarga dengan berbagai latar belakang ekonomi dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. (Irhamisyah, n.d.)

dengan di implementasikan nya kurikulum merdeka belajar bagi pendidikan di Indonesia di harapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga bisa mencapai salah satu program SDGS yaitu di bidang pendidikan. Sehingga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas serta mampu mengejar ketertinggalan dengan negara-negara di dunia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka (*library research*) dengan menggunakan *content analysis*. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku serta sumber bacaan yang lainnya baik cetak maupun online. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif-analitik yang akan

dibahas dengan jelas, runtun, dan sistematis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan membaca dan mencatat bahan penelitian, kemudian tahap selanjutnya dengan menganalisis data dengan melakukan penyajian data dan pembahasan secara kualitatif konseptual. (Hazin & Laila, 2022)

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Pendidikan Dasar Berkualitas

Pendidikan merupakan sebuah upaya intelektual serta spiritual guna mencerdaskan manusia sejak baik dalam lembaga pendidikan formal ataupun lembaga pendidikan nonformal yang dilaksanakan secara sistematis, metodologis, dan filosofis. (Marpaung et al., 2023). Pendidikan merupakan suatu upaya bagi manusia untuk menjadi lebih baik. Sebagai pegangan utama terkait definisi Pendidikan, dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Banurea et al., 2023)

Feigenbaum menyatakan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk/jasa. Garvin dan Davis menyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. (Ilahi & Arifudin, 2022)

Pendidikan di Indonesia atau Pendidikan Nasional sudah memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan SDM yang cerdas dan juga bisa menghasilkan kepribadian berkarakter, mempunyai akhlak yang baik, kreatif, mempunyai sebuah visi serta misi, bertanggung jawab dan bisa menjadi warga negara yang baik. Untuk bisa menghasilkan sumber manusia

yang berkualitas diperlukan adanya proses yang terintegrasi dengan usaha peningkatan kualitas mutu pendidikan. Sehingga, dalam hal ini upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangat ditekankan kepada pentingnya peran lembaga pendidikan yaitu sekolah selaku peranan pokok yang otonom, peranan orang tua siswa serta masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan.

Dalam kaitannya tentang kualitas pendidikan, Jerome S Arcaro menjelaskan bahwa setiap program mutu harus memperhatikan empat komponen penting yaitu: a.) Adanya komitmen untuk berubah, baik dari anggota dewan sekolah ataupun para administrator. Meski pula proses awal perubahan atau penerapan mutu tersebut banyak mengalami kendala, namun proses pembelajaran yang diperoleh dari proses kegagalan, kegagalan itu akan menuju kesuksesan yang diharapkan. b.) Adanya pemahaman yang baik tentang dimana keberadaan sekolah, artinya usaha perubahan yang sudah direncanakan berhasil atau tidaknya. Harus diketahui terlebih dahulu bagaimana system yang berjalan saat ini. c.) Adanya visi masa depan yang jelas dan dipegang oleh semua orang yang ada pada lingkungan sekolah. Dengan visi itulah lembaga pendidikan akan di tuntut dan diarahkan agar tetap focus dan berkomitmen dalam program mutu tersebut. d.) Adanya rencana implementasi mutu sekolah. Rencana tersebut harus menjadi pedoman dalam proses yang senantiasa mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan bermutu ini menuntut adanya pengelolaan lembaga yang efektif dan efisien dalam segala aspeknya, baik aspek SDM, dana, serta sarana prasarana. Pengelolaan lembaga yang efektif dan efisien dapat tercapai jika pengelola atau pimpinannya efektif, yaitu bersifat terbuka dan adaptif. Kedua sifat ini akan menentukan pemimpin yang memiliki pengaruh kepada guru dan personil lainnya terhadap pencapaian tujuan. Dan pemimpin yang adaptif akan banyak mendapat dukungan dari bawah. Adapun lembaga pendidikan yang dikelola secara efektif dan efisien akan berdampak positif dalam mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien pula, yang akhirnya menghasilkan lembaga dan lulusan yang unggul. Tujuan ini tidak mudah mencapainya, karena harus didukung oleh semua elemen lembaga, mulai dari pimpinan, staf, guru-guru dan murid. Bahkan keterlibatan orang tua, masyarakat sekitar dan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga perlu diajak berkomunikasi. Hal ini

mengingat bahwa lembaga pendidikan bukanlah milik pimpinan, tetapi milik dan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga, orang tua dan masyarakat.(Helmina Dewi & Lazwardi, 2022)

Konsep Dasar SDGS

Konsep Sustainable development goals (SDGs) itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin di hasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: Lingkungan, Sosial dan ekonomi.

SDGs merupakan strategi pembangunan progresif yang mengadopsi pendekatan multi-sektoral, berbasis hak, dan berpusat pada masyarakat yang menyatukan berbagai upaya global untuk mengubah cara pembangunan diwujudkan hingga tahun 2030(Sidibé, 2016). Ada dua tren penggunaan istilah keberlanjutan yang sangat berbeda saat ini, yaitu model biasa yang berfokus pada praktik keberlanjutan yang dapat diadaptasi untuk menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan mode yang lebih mendasar dengan mempertanyakan banyak pandangan dunia yang memicu ekonomi pasar bebas. (Walker, 2017).

Tujuh belas tujuan global dari SDGs diantaranya : 1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana; 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; 3) memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia; 4) memastikan inklusif dan pendidikan berkualitas yang adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6) memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) memastikan akses terjangkau, andal, energi berkelanjutan dan modern untuk semua; 8) mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua; 10) mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara- negara; 11) menjadikan kota

dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan; 12) pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan; 15) melindungi, memulihkan, dan mempromosikan keberlanjutan penggunaan ekosistem terestrial, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16) mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan; dan yang terakhir yaitu 17) memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global. (Indriya et al., n.d.)

Kondisi Pendidikan Dasar Saat Ini

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan tuntutan konstitusi dimaksud, pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa. (Hakim, 2016)

Menelaah hasil beberapa lembaga survei internasional menyimpulkan capaian prestasi peserta didik Indonesia di kacamata internasional masih minim dan tertinggal sebagai akibat dari minimnya kualitas pendidikan jika ditimbang dari pandangan negara lain. Hal ini dikuatkan dengan fakta Indonesia menduduki urutan terbawah didampingi negara Filipina. (Hidayah & Yuliawati, 2021). Citra Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah apa yang direncanakan dalam SDGs. Akibatnya, dalam skenario ini, kesenjangan pendidikan merupakan hambatan utama untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Situasi pendidikan di kota-kota besar jauh lebih unggul daripada di daerah unggulan, luar provinsi, dan daerah miskin (3T). Artinya, pertumbuhan di Indonesia terfokus pada pulau Jawa dan Sumatra selama satu dekade

terakhir, sementara pulau-pulau lain, seperti Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua jauh tertinggal. Dalam hal pemerataan pedagogis, indikator disparitas pedagogis yang muncul di Indonesia antara lain sarana dan prasarana pedagogik serta sumber daya pengajaran yang tersedia. (Nurfatihah et al., 2022)

Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktekkan. Permasalahan umum yang terjadi pada aras input yaitu penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas seseorang, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia sudah menjadi hal yang prestisius bagi beberapa kalangan. Seberapa pun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pihak sekolah, atas nama gengsi dan harapan akan gelar kesarjanaan yang dapat meroketkan martabat keluarga, akan dikeluarkan. Namun, bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, persoalan masuk sekolah bukan melulu tentang gengsi, melainkan mampu atau tidaknya. Bahkan sudah menjadi pemandangan wajar, tiap tahun ajaran baru,. Permasalahan pada proses pembelajaran tak kalah kompleksnya dengan upaya memasukkan anak ke sekolah. Usaha untuk bisa memasukkan anak ke sekolah unggulan kadang tidak dibarengi dengan pemberian motivasi yang positif bagi si anak. Anak seharusnya diberikan gambaran mengenai apa yang ingin ia capai, bukan memberi gambaran apa yang ingin orangtua capai dari si anak Pada aras output, yakni berkaitan dengan kelulusan, maka akan berhadapan dengan permasalahan yang masih gencar dipertahankan dan dipertentangkan, yaitu masalah UN (Ujian Nasional). Semenjak tahun 2008 UN diwajibkan sampai tingkat SD (Sekolah Dasar) dan sederajat. Hal ini jelas menuai protes dari banyak kalangan, dikarenakan bertentangan dengan program nasional “Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun” yang telah diberlakukan mulai tahun 2013. Wajar 12 tahun mewajibkan anak-anak berusia 7-19 tahun untuk dapat mengenyam

bangku sekolah. Tetapi untuk dapat lulus dari SD saja anak didik harus melalui tahap seleksi yang didasarkan pada nilai UN dan hasil raport dari kelas IV sampai VI. Otomatis anak-anak yang nilai rendah tidak dapat melanjutkan ke SMP Negeri, dan jika harus bersekolah di swasta belum tentu orangtua mereka mampu membayar biaya yang diajukan pihak sekolah (MEGAWANTI, 2012)

Masalah kualitas dan kuantitas guru terus menjadi masalah. Kesenjangan distribusi tenaga pengajar ditunjukkan dengan minimnya jumlah pengajar. Di pedesaan, perbatasan, dan lokasi terpencil, kekurangan guru tersebar luas. Hanya ada 3 sampai 4 guru di staf. Sementara itu, di kota-kota dengan infrastruktur yang memadai, jumlah pengajar semakin bertambah (Nurfatihah et al., 2022). Keadaan pendidikan di Indonesia hingga kini masih harus ditingkatkan agar menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat. Pemerintah juga harus siap dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, harus meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas memadai, kualitas guru, pemberlakuan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan jaman karena mengingat kurikulum di Indonesia masih ketinggalan jauh dengan Negara lainnya. Dalam meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia, peserta didik juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan selaras dengan minat dan bakatnya supaya siswa bisa melaksanakan pendidikan yang bernilai. Berdasarkan hal itu guru juga memiliki peranan untuk meningkatkan kualitas di Indonesia karena siswa yang berkualitas lahir dari guru yang berkualitas pula. Maka peranan guru profesional sangat diperlukan saat ini terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah pelosok yang kurangnya akses teknologi (A. O. Safitri et al., 2022)

Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Pendidikan Dasar Saat Ini

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Pendidikan dasar saat ini yaitu:

Kurikulum yang Membingungkan dan Terlalu Kompleks

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu, relevansi dan efisiensi dalam system pendidikan nasional terus dilaksanakan. Di antara upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tersebut adalah dengan penyempurnaan

kurikulum. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak mutu pendidikan. Namun perubahan dan penyempurnaan kurikulum yang dilakukan selama ini nampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan tersebut. (Adelia & Mitra, 2021)

Kurikulum merupakan sebuah rancangan atau program yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan untuk peserta didiknya. Di Indonesia, terhitung sudah mengalami 10 hingga 11 kali perubahan kurikulum sejak Indonesia merdeka. Tentu perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan, terutama bagi pendidik, peserta didik, dan bahkan orang tua. Selain perubahan kurikulum, kurikulum yang diterapkan di Indonesia juga terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya. Sehingga, sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampaknya. Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi-materi dan tugas mengajari muridnya dengan materi yang banyak. Sehingga, tidak menutup kemungkinan pendidik menjadi kurang optimal dalam mengajari muridnya. (Nur & Kurniawati, 2022)

Pendidikan Yang Kurang Merata

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Sehingga, hal ini menyebabkan pelaksanaan proses pendidikan juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan permasalahan di negara yang masih berkembang, seperti kurang meratanya pendidikan terutama di daerah-daerah tertinggal. Ketidakmerataan ini sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pendidikan semakin mahal juga biayanya. Sehingga, tak jarang banyak orang yang memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan banyak biaya.

Penempatan Guru Yang Tidak Seimbang

Pada beberapa kasus pendidikan di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi. Terutama penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan

penempatannya atau keahliannya. Hal ini dapat menyebabkan guru tidak bisa optimal dalam mengajar. Menurut Jakaria, ketidaklayakan mengajar guru dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu ketidaksesuaian antara bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut (Jakaria et al., n.d.) Masalah penempatan guru ini biasanya terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal itu membuat guru yang ada harus bisa mengajar bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Kekurangan guru ini biasa terjadi di daerah yang terpencil, karena tidak meratanya penyaluran guru ke daerah tersebut.

Rendahnya Kualitas Guru

Guru merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Peran seorang guru sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Tidaklah mudah hidup menjadi seorang guru, begitu banyak tanggung jawab yang dilakukan. Namun, nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya melakukan pekerjaannya sekedar untuk mendapat penghasilan. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai alat untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi pendidik / guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidik. Menyadarkan guru bahwa pekerjaan mereka merupakan pekerjaan profesional merupakan “upaya awal” yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan harapan.

Masih adanya anggapan bahwa semua orang bisa menjadi guru, asalkan mereka dapat menyampaikan materi pelajaran, hal itu merupakan suatu pandangan yang keliru dan harus diluruskan. Sebab tugas dan fungsi guru itu bukan hanya sekedar penyampaian materi saja, akan tetapi adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan membimbing, melatih keterampilan, memotivasi agar siswa dapat memecahkan berbagai persoalan kehidupan (Adelia & Mitra, 2021)

Biaya Pendidikan Yang Mahal

Saat ini sudah menjadi rahasia umum dengan anggapan “semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan”. Hal tersebut perlu menjadi perhatian

pemerintah, dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak akibat mahalny biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan sangatlah membebani masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah lapisan menengah kebawah. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan harus mengeluarkan biaya yang besar. Adapula anak yang ingin bersekolah namun terkendala biaya sehingga terpaksa untuk berhenti sekolah. Perlu diketahui bahwa biaya pendidikan yang mahal akan membuat ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan.

Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan. Termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu fasilitas yang tidak memadai, bahkan tidak ada fasilitas sama sekali. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Menurut Yustikia, sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dengan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses belajar. Proses belajar dinilai akan kurang bermaksna(Ni et al., n.d.)

Dari hasil penelitian problem yang dirasakan oleh seorang guru adalah kurang efektifnya kegiatan belajar karena dilaksanakan dengan sarana prasarana yang kurang lengkap sehingga anak didik tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan guru. Kurangnya fasilitas yang memadai pada saat pelaksanaan pembelajaran dirumah akan memunculkan kekurang pahaman tentang materi yang disampaikan guru kepada peserta didiknya. Seharunya untuk mempermudah pembelajaran secara (daring) perlu dipersiapkan terlebih dahulu sarana prasaranya seperti laptop, komputer atau hand phone yang dapat mempermudah guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Karena jika dalam kegiatan

belajar mengalami keterbatasan fasilitas maka akan menghambat proses pembelajaran dan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. (Suherman, 2020)

Upaya Meningkatkan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's (SDG's)

Sektor pendidikan merupakan bidang penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Indonesia. Pembangunan negara Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi pendidikan yang optimal, di mana produktivitas sumber daya manusia dapat dimaksimalkan. Lebih lanjut, ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik dinilai menjadi sumber kekuatan yang signifikan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia harus terus fokus dan memperhatikan kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan, serta jumlah guru yang tersedia, akan menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan karena kedua faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan yang unggul di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan solusi untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tentunya yang dapat menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun beberapa solusi dari permasalahan tersebut sebagai berikut.

Optimalisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Permasalahan pendidikan yang ada saat ini direspons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya penulis sebut dengan Kemendikbud) dengan mengeluarkan kebijakan —Merdeka Belajar. Nadiem Makarim selaku Kemendikbud secara tegas menyebutkan bahwa konsep —Merdeka Belajar yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Kebijakan ini dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidik. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Di antara perubahan besar kebijakan Merdeka Belajar dengan Kurikulum 2013 adalah (1) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional (UN) berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter; (3)

kebebasan pendidik untuk mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan 4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB) (syamsul Arifin:2021)

Esensi kemerdekaan berpikir, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompentensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Konsep Merdeka Belajar terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. (Uswatiyah et al., 2021)

Melakukan Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada lingkungan sekitar, mendorong tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan modern berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Sekolah merupakan komponen utama dalam terjadinya proses pembelajaran dan, faktanya masih banyak sekolah di Indonesia yang belum mampu memenuhi kualifikasi Standar Nasional Pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa ini masih belum optimal dalam melaksanakan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan adil. Stigma yang timbul dimasyarakat adalah terdapat perbedaan kualitas sekolah, sehingga ketimpangan selalu terjadi, apabila tetap dibiarkan akan berpengaruh pada kewibawaan pendidikan negara. Diantara pemerataan pendidikan yang bisa dilakukan yaitu:

Sistem zonasi; Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Indonesia. (Nanggala, 2020)

Program Indonesia Pintar (PIP) PIP merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Adapun tujuan dari PIP ini adalah untuk membantu biaya sekolah peserta didik yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Septiandika, 2017). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (Rohaeni & Saryono, 2018) bahwa kebijakan PIP melalui KIP yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah wewenang Kementerian dan Kebudayaan bertujuan untuk menyediakan bantuan terkhusus untuk siswa miskin sehingga dapat melanjutkan sekolahnya, dengan demikian sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mencegah anak putus sekolah. (Ghia Dimmera et al., n.d.)

Meningkatkan Profesionalisme Dan Kesejahteraan Guru

Melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2017 menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kompetensi dan sikap profesional untuk diajarkan kepada peserta didik. (Kristiawan & Rahmat, 2018). Guru berada di barisan terdepan dalam menciptakan mutu pendidikan. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang bermutu, baik secara akademis, skill, kematangan emosional dan moral serta spiritual. Dengan demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zaman. Dalam menciptakan mutu pendidikan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya saat dibutuhkan. (Nurlatifah & Balitar, n.d.)

Sebagai tenaga profesional, guru hanya dapat melaksanakan tugasnya jika memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan pada setiap jenis pendidikan dan jenjang tertentu. Guru berkewajiban, sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya, untuk: a). Meningkatkan kualifikasi akademik dan keterampilan secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan motivasi guru. sebuah. Berdasarkan pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran yang berkualitas, dan evaluasi hasil pembelajaran. b). Bertindak objektif dan tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, atau kondisi fisik tertentu atau riwayat keluarga; c). Mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, dan prinsip-prinsip agama dan moral; dan tingkat pembelajaran yang dicapai oleh siswa menunjukkan perlunya sikap profesional dari pihak guru. (Muhalisiah et al., 2023)

Hak-hak guru meliputi: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan ke (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, dan yang lainnya. Kesejahteraan dapat diukur dari penghasilan tetap, tunjangan, dan penghargaan. Dengan demikian, guru dikatakan sejahtera apabila indikator tersebut terpenuhi. (Akhyar et al., 2021)

Untuk menciptakan sistem kesejahteraan yang efektif yang perlu diperhatikan adalah : a. Sistem imbalan harus mempunyai daya tarik bagi tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk bergabung dengan organisasi Setiap organisasi akan selalu bersaing dengan organisasi yang lain di pasar kerja. Oleh karena itu, kesejahteraan yang ditawarkan hendaknya mampu menarik para pencari kerja yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang tinggi b. Sistem imbalan harus merupakan daya tarik kuat untuk mempertahankan tenaga kerja yang sudah berkarya dalam organisasi Kesejahteraan adalah bukan satu-satunya faktor pengikat bagi para pegawai untuk tetap tinggal dalam suatu organisasi. Namun tak dapat dipungkiri bahwa apabila jumlah atau tingkat kesejahteraan

yang diperoleh lebih rendah dari kesejahteraan yang diterima oleh rekan-rekannya yang melakukan tugas yang sejenis di organisasi lain ada kecenderungan para pegawai akan memilih tempat bekerja mereka di tempat yang baik tingkat kesejahteraannya. c. Sistem imbalan yang mengandung prinsip keadilan Secara internal prinsip keadilan yang dimaksudkan adalah bahwa para pegawai yang melaksanakan tugas sejenis mendapat imbalan yang sama pula. Namun tentunya faktor lainnya juga harus menjadi bahan pertimbangan, seperti faktor masa kerja, jumlah tanggungan dan lain sebagainya d. Sistem kesejahteraan perilaku positif Sistem kesejahteraan harus mencerminkan penghargaan terhadap perilaku positif para pegawai yang meliputi, kejujuran, kesetiaan, prestasi yang tinggi, ketekunan dan lain-lainnya. Pengendalian Pembiayaan Biasanya biaya belanja pegawai merupakan komponen biaya yang sangat besar. Dengan demikian kesejahteraan yang diberikan kepada para pegawai tidak terlalu tinggi sehingga dapat membebani organisasi dan tidak perlu rendah sehingga berdampak kepada peraturan perundang-undangan. f. Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan Semua organisasi wajib mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh negara, termasuk peraturan dalam bidang penggajian. Kesemuanya dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pegawai menerima hak-haknya sesuai dengan kewajiban yang mereka tunaikan. g. Tercipatanaya administrasi pengupahan dan penggajian yang berdaya guna dan berhasil guna Kondisi yang berkembang di lingkungan pendidikan Sekolah Dasar. (Indriyani et al., 2020)

Menurut Ivancevich dalam Wibowo (2014: 290) hanya membedakan dua bentuk kesejahteraan yaitu kompensasi finansial yang meliputi honor, bonus, atau komisi dan kompensasi nonfinansial. 1. Bentuk kompensasi finansial meliputi honor, bonus, atau komisi Bentuk kesejahteraan guru yang diberikan kepala sekolah berupa finansial yaitu meliputi honor guru dimana setiap bulan guru Non PNS menerima honor setiap bulan. Selanjutnya berupa bonus yang diberikan kepala sekolah yaitu jika ada guru Non PNS yang melatih kegiatan ekstra baik pramuka, melatih nari, maupun melatih drumband, maka akan diberikan bonus. Selanjutnya yaitu pemberian komisi, kepala sekolah memberikan komisi jika guru Non PNS berhasil membawa siswa baru. Hal tersebut bertujuan agar guru lebih semangat dalam mencari siswa baru. 2. Bentuk kompensasi nonfinansial berupa

penghargaan Kepala sekolah dalam memberikan kompensasi nonfinansial berupa penghargaan yaitu sebuah pujian atau reward kepada guru, karena kinerja guru bagus dan patut di acungi jempol. Pujian bukan hanya sekedar pujian semata, tetapi pujian bisa membangkitkan semangat guru dalam mengajar dan dalam bekerja di sekolah.(D. Safitri et al., n.d.)

Sedangkan menurut Nurlatifah agar menjadi guru yang professional maka guru harus mengikuti kegiatan sebagai berikut:

Mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)

Dalam hal ini menurut Wina Sanjaya, ada beberapa tujuan untuk diselenggarakannya MGMP ini, yaitu: a) Untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional; b) Untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; c) Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya; d) Untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan; e) Untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, classroom action research, referensi, dan lain-lain kegiatan profesional yang di bahas bersama-sama.

Supervise Pembelajaran

Supervisi pembelajaran adalah bantuan dalam wujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, terutama dalam proses belajar mengajar. Supervisi pembelajaran bertujuan sebagai berikut: a) Memperbaiki proses belajar mengajar, b) Perbaikan tersebut dilaksanakan melalui supervisi, c) Yang melakukan supervisi adalah supervisor, d) Sasaran supervisi tersebut adalah guru atau orang lain yang ada kaitannya atau dalam rangka memberikan layanan

supervisi kepada guru, e) Secara jangka panjang maksud supervisi tersebut adalah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi pembelajaran adalah terbaiknya proses belajar mengajar, yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa, melalui serangkaian tindakan, bimbingan dan arahan.

Pembinaan Rutin Dan Penugasan

Pembinaan rutin itu sangat diperlukan agar pembelajaran lebih maju. Karna guru yang ideal adalah guru yang secara terusmenerus mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, serta mengadaptasi berbagai permasalahan untuk menjadi guru terbaik diklat itu sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kegiatan program pengembangan sumberdaya manusia (*personil development*). Hal ini dipertegas oleh pendapat Castetter yang dikutip oleh Wahyosumidjo, mengatakan bahwa Diklat merupakan proses perbaikan staf melalui berbagai macam pendekatan yang menekankan realisasi diri (kesadaran), pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Pengembangan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (*abilities*), sikap (*attitudes*), kecakapan (*skills*) dan pengetahuan dari anggota organisasi. (Nurlatifah & Balitar, n.d.)

KESIMPULAN

Upaya meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia khusus nya Pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Bersama dengan berseinerjanya antara pemerintah, pihak swasta dan juga Lembaga Pendidikan itu sendiri, karena pada realita nya masih terdapat permasalahan-permasalahan Pendidikan yang ditemukan mulai dari Pendidikan yang tidak merata di tiap daerah di Indonesia, kurikulum yang bergonta-ganti, kualifikasi guru yang rendah serta biaya Pendidikan yang mahal. Sehingga perlu solusi dan upaya perbaikan Pendidikan khususnya Pendidikan dasar di Indonesia di antaranya yaitu optimalisasi implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, dan kualitas Pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

REFERENSI

- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). *Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah* (Vol. 21, Issue 01). <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/832>
- Akhyar, A., Hasbiyallah, H., Hasanah, A., Basri, H., & Ruswandi, U. (2021). IMPACT OF TEACHER WELFARE ON IMPROVING THE QUALITY OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION. *Ta Dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 61–72. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v10i1.7583>
- Andari, S., Chandra Setiawan, A., & Rifqi, A. (n.d.). *Student Exchange Program Of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) In Covid-19 Pandemic*. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpp/article/view/20264>
- Banurea, Simanjuntak, Siagian, & Turnip. (2023). PERENCANAAN PENDIDIKAN. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/52>
- Chrisyarani, D. D., Rahayu, S., Yulianti, Y., Meviana, I., Asmah, A., & Ladamay, I. (2022). Analisis Dampak Pengembangan dan Implementasi Kurikulum MBKM Terhadap Kepuasan Mahasiswa FIP UNIKAMA. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 6(1), 47–55. <https://doi.org/10.21067/jbpd.v6i1.6617>
- Ghia Dimmera, B., Pebria Dheni Purnasari, dan, Studi Manajemen, P., Shanti Bhuana, I., Bukit Karmel No, J., & Barat, K. (n.d.). *PERMASALAHAN DAN SOLUSI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG*. <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1137>
- Hakim, L. (2016). PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Jurnal EduTech*, 2(1). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>
- Hazin, M., & Laila, A. (2022). PROBLEMATIKA MANAJEMEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN KAMPUS UMUM. In *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 01, Issue 01). <https://ejournal.staiha.ac.id/index.php/aksi/article/view/205>
- Helmina Dewi, W., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *Mindset: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54–61. <https://doi.org/10.58561/mindset.v1i1.29>
- Hidayah, V. N., & Yuliawati, F. (2021). *KURIKULUM TEMATIK 2013 DALAM FRAMEWORK SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI SEKOLAH DASAR* (Vol. 13, Issue 2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/eduhumaniora/article/view/35824>

- Ilahi, & Arifudin. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank. *Amsir: Bunga Rampai Jurnal*, 1(1). <https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/abrj/article/view/123>
- Indriya, I., Amara, H., Nusaibah, H., & Nurmala, I. (n.d.). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/3404>
- Indriyani, Saefulloh, & Riono. (2020). PENGARUH DIKLAT KEPENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN GURU TERHADAP KUALITAS GURU DI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON. *Syntax Idea*, 2(7). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/441>
- Irhamisyah, F. (n.d.). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*. www.unsplash.com
- Jakaria, Y., Kelayakan, A., Antara, K., Belakang, L., Guru, P., Dasar, S., Pelajaran, M., Diampu, Y., Kesesuaian, D., Belakang, A. L., Mata, D., Diampu, P. Y., Pusat, Y. J., & Kebijakan, P. (n.d.). ANALYSIS OF APPROPRIATENESS AND SUITABILITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' EDUCATIONAL BACKGROUND AND THEIR TAUGHT-SUBJECT-MATTER. <https://www.researchgate.net/publication/323610709> Analisis Kelayakan dan Kesesuaian antara Latar Belakang Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan Mata Pelajaran yang Diampu
- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy ARTICLE INFO ABSTRACT Article History. *Jurnal Kajian Peradaban Islam OPEN ACCESS JKPIs*, 4(1), 2021. www.jkpiis.com
- Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi Pembelajaran. <https://doi.org/10.25217/ji.v3i2.348>
- Marpaung, Siahaan, Sitorus, & Turnip. (2023). ADMINISTRASI PENDIDIKAN. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/53>
- MEGAWANTI. (2012). MERETAS PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *FORMATIF: Jurnal Pendidikan MIPA*, 2(3). <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/105>
- Muhalisiah, M., Darmiyanti, A., & Muna'fiah, N. (2023). Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Anak Usia Dini di RA Al-Hidayah. *AS-SABIQUN*, 5(1), 110–123. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v5i1.2700>
- Nanggala. (2020). ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal*

- Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24758>
- Ni, O. :, Sri, W., Pengawas, Y., Tingkat, M., Di, T., Agama, K., & Badung, K. (n.d.).
PENTINGNYA SARANA PENDIDIKAN DALAM MENUNJANG KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH.
<https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/GW/article/view/1053>
- Nur, F., & Kurniawati, A. (2022a). MENINJAU PERMASALAHAN RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN SOLUSI. In *AoEJ: Academy of Education Journal* (Vol. 13, Issue 1).
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/765>
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- Nurlatifah, S., & Balitar, U. (n.d.). STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MAN 2 KOTA KEDIRI. In *PROPHETIK : Jurnal Kajian Keislaman: Vol. XX.*
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/prophetik/article/view/2591>
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR.*
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2539>
- Rusli Baharuddin, M. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1).
<https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Safitri, D., Toharudin, M., & Sunarsih, D. (n.d.). Analisis Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Non PNS. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022(19), 74–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7162544>
- Saihu, S. (2019). KOMUNIKASI PENDIDIK TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH KHUSUS ASY-SYIFA LARANGAN. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 418–440.
<https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66>
- Sidibé, M. (2016). Religion and Sustainable Development. In *Review of Faith and International Affairs* (Vol. 14, Issue 3, pp. 1–4). Routledge.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215848>

- Suastika, I. K., Suwanti, V., Ferdiani, R. D., & Harianto, W. (2022). Analisis Kepuasan Stakeholder pada Implementasi Kurikulum MBKM Fakultas Sains dan Teknologi. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 1657–1667. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2176>
- Suherman, H. (2020). *Problematika dan Tantangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Tengah Pandemi Covid-19*. 14(2). <https://eric.ed.gov/>
- Uswatiyah, W., Pascasarjana, M., Unnus, S., Tarbiyah, F., Nasional, I., Roiba, L., Argaeni, N., Suherman, D., & Berlian, U. C. (2021). Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.17467/jdi.v3i1.299>
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Walker, P. (2017). Sustainability: a discipline and a political agenda? In *Environmental Hazards* (Vol. 16, Issue 2, pp. 93–98). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/17477891.2017.1296810>
- Yonisa, R., Jurusan, K., Ekonomi, P., Ekonomi, F., & Surabaya, U. N. (2016). *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun*. <http://seminars.unj.ac.id/konaspi/file/Prosiding%20KONASPI%20VIII%202016.pdf>

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH DAN PENYERAHAN HAK CIPTA
NASKAH PENULIS ARTIKEL ATTADIB: JURNAL PENDIDIKAN DASAR**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama & Gelar : Tohir Solehudin , S.Pd .
Tempat / Tgl Lahir* : Bogor/ 02 Maret 1997
Nama Institusi * : Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Alamat Institusi * : Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Bogor, 16164
Telp/HP* : 082110975474
E-mail* : tohirsolehudin47@gmail.com
No Rek & Bank* : 7088292377
NPWP (No. Pajak)* : 94.306.702.5-434.000
judul artikel : Judul Artikel
Artikel diserahkan : Tanggal ____ Bulan _____ Tahun _____

Saya menyatakan bahwa artikel tersebut di atas adalah naskah asli , hasil pemikiran sendiri , bukan saduran / terjemahan , bebas dari plagiasi dan belum pernah target di media apapun . Saya tidak berkeberatan jika naskah mengalami penyuntingan tanpa mengubah substansi atau ide pokok tulisan.

Saya juga menyerahkan hak milik atas naskah tersebut untuk redaksi jurnal *Attadib : Jurnal Pendidikan Dasar* , dan oleh karena itu redaksi berhak memperbanyak dan menerbitkan sebagian atau totalnya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya jelas .

Bandung, 23 Desember 2021

Penulis ,

(Tohir Solehudin)

* Diisi dengan penulis data utama

Mohon Pernyataan ini terkirim kembali via email ke : attadib@uika-bogor.ac.id